

Analisis Kompetensi Profesional Pengelola Pendidikan Masyarakat / Non Formal di PKBM Al Jauhar

Sulisnah¹, Arin Khairunnisa²

^{1,2} Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Korespondensi: sulisnah1@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Diterima April 16th, 2026

Direvisi Mei 02th, 2026

Diterima Mei 04th, 2026

Kata kunci:

Etika Profesi, Pendidikan non formal, pengelola PKBM.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya etika profesi dalam pengelolaan lembaga pendidikan nonformal, khususnya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Pengelola PKBM memiliki peran strategis dalam menentukan mutu layanan pendidikan, sehingga diperlukan sikap profesional yang berlandaskan nilai moral dan etika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan etika profesi oleh pengelola PKBM Al Jauhar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara mendalam. Informan utama dalam penelitian ini adalah Kepala PKBM Al Jauhar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika profesi tercermin dalam sikap jujur, adil, bertanggung jawab, transparan, dan profesional dalam pengambilan keputusan, pengelolaan staf, penilaian warga belajar, serta hubungan dengan masyarakat. Pengelola PKBM juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan lembaga. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa etika profesi tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, tetapi juga menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara sebagaimana tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1), yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dalam rangka pemerataan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, pemerintah menyelenggarakan berbagai jalur pendidikan, salah satunya adalah pendidikan nonformal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). PKBM memiliki peran strategis dalam memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat yang tidak dapat mengenyam pendidikan formal, baik karena faktor ekonomi, sosial, maupun geografis. Dalam penyelenggaraan lembaga tersebut, peran seorang pengelola atau kepala PKBM sangat menentukan keberhasilan program yang dilaksanakan. Pengelola bertanggung jawab penuh terhadap perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program, sekaligus memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan visi dan misi lembaga. Namun, keberhasilan lembaga tidak hanya ditentukan oleh kemampuan manajerial semata, tetapi juga oleh etika profesi yang dimiliki oleh pengelola. Pengelola PKBM tidak hanya dituntut memiliki kompetensi dalam perencanaan dan pelaksanaan program, tetapi juga harus mampu menginternalisasi nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam setiap keputusan yang diambil.

Etika profesi merupakan pedoman moral dan perilaku profesional yang menjadi dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Pengelola PKBM dituntut untuk memiliki sikap jujur, adil, tanggung jawab, serta menghormati semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Pendidikan. Menurut Ngalim Purwanto (2002:45), etika profesi adalah prinsip moral yang dijadikan pedoman oleh seseorang dalam menjalankan pekerjaan profesionalnya agar tidak menyimpang dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Dalam pendidikan masyarakat atau pendidikan nonformal, penerapan etika profesi menjadi semakin krusial mengingat karakteristik lembaga yang berbasis masyarakat, seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). PKBM melayani warga belajar dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan usia yang beragam, sehingga pengelola dituntut untuk bersikap adil, objektif, dan bertanggung jawab dalam setiap keputusan yang diambil. Hal ini sejalan dengan prinsip etika profesi menurut Keraf

dalam Surajiyo (2022:784) yang meliputi tanggung jawab, kejujuran, keadilan, kebebasan profesional, dan otonomi dalam menjalankan profesi.

Profil lulusan pengelola atau perancang pendidikan masyarakat seharusnya mencerminkan penguasaan kompetensi profesional yang utuh, tidak hanya pada aspek manajerial dan teknis, tetapi juga pada aspek etika dan moral. Menurut Safitri & Yusiya (2020:206) menyatakan, kompetensi adalah karakteristik seseorang yang berkaitan dengan kinerja efektif dan atau unggul dalam situasi pekerjaan tertentu. Berdasarkan pendapat tersebut, kompetensi tidak hanya mencakup pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga sikap dan nilai yang memengaruhi kualitas kinerja seseorang dalam menjalankan tugasnya. Kemampuan mengambil keputusan secara objektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan lembaga merupakan bagian dari kompetensi etis yang harus dimiliki oleh pengelola pendidikan nonformal. Tanpa landasan etika profesi yang kuat, pelaksanaan tugas pengelolaan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, ketidakadilan, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan.

Secara normatif, penyelenggaraan pendidikan nonformal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 26 ayat (4) tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal serta harus dilaksanakan secara profesional. Ketentuan ini mengandung makna bahwa pengelola pendidikan nonformal memiliki tanggung jawab moral dan hukum dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip etika profesi. Etika dan hukum saling melengkapi, di mana etika mengarahkan perilaku profesional sehari-hari, sedangkan hukum menjadi batas formal yang mengatur konsekuensi dari tindakan profesional.

Berbagai kajian menunjukkan bahwa penerapan etika profesi berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan lembaga pendidikan. Menurut Prahestiwi (2022) menyatakan bahwa pembagian fungsi pengelola ini mempermudah koordinasi dan meningkatkan kinerja lembaga dalam memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, keberhasilan PKBM sangat ditentukan oleh kemampuan pengelola dalam membangun hubungan kerja yang harmonis, berlandaskan sikap profesional dan etis. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan etika profesi dalam praktik pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), khususnya dalam membentuk profil profesional pengelola/perancang pendidikan masyarakat/nonformal yang berlandaskan nilai moral, keadilan, tanggung jawab, dan profesionalisme. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan etika profesi oleh pengelola PKBM Al Jauhar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan etika profesi dalam pengelolaan PKBM sebagai bagian dari pembentukan profil profesional pengelola pendidikan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan tujuan untuk mendeskripsikan etika profesi yang diterapkan oleh kepala PKBM di Lembaga Pendidikan Masyarakat. Penelitian ini dilakukan di PKBM Al-Jauhar, subjek dalam penelitian ini Adalah Ibu Upi Muzdhalifah S.Pd. selaku Kepala PKBM Al Jauhar. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi; observasi dan wawancara, agar data yang di peroleh bersifat mendalam, faktual, dan menggambarkan kondisi nyata di lapangan.

Pendekatan ini sejalan dengan pendapat Moleong dalam Hastuti (2020:86) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Proses ini memungkinkan peneliti untuk memaparkan fakta fakta di lapangan serta menginterpretasikannya dalam bentuk uraian deskriptif yang menggambarkan ucapan, tulisan, maupun perilaku yang diamati, sesuai dengan pendekatan komprehensif.

Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian, selanjutnya data disajikan dalam bentuk narasi, dan tahap akhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Modal Sosial Keluarga sebagai Fondasi Pembentukan Karakter

Hasil penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan Kepala PKBM Al Jauhar, Ibu Upi Muzdhalifah, yang telah memiliki pengalaman selama 20 tahun dalam mengelola lembaga pendidikan nonformal. Wawancara dilakukan untuk menggali pemahaman, sikap, dan praktik etika profesi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di lingkungan PKBM. Dari hasil wawancara dengan Kepala PKBM Al Jauhar, Ibu Upi Muzdhalifah, yang memiliki pengalaman lebih dari dua puluh tahun, diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai etika profesi dalam pendidikan nonformal. Etika profesi dipahami sebagai tanggung jawab moral dan perilaku seorang pendidik yang menjadi panutan bagi peserta didik. Kepala PKBM menekankan bahwa etika profesi penting karena guru dan pengelola harus menunjukkan karakter yang baik di tengah tantangan moral yang dihadapi siswa. Etika profesi tidak hanya berkaitan dengan moral, tetapi juga terkait dengan aturan hukum yang menjadi batas formal dalam menjalankan profesi. Dalam hal kompetensi, Ibu Upi menekankan bahwa moral yang baik, kemampuan bersikap adil, bijaksana, dan memiliki leadership yang sehat merupakan kompetensi utama bagi seorang pengelola PKBM. Kompetensi ini terus ditingkatkan melalui pemahaman regulasi, kebijakan pendidikan, serta perilaku yang konsisten sesuai dengan tuntutan profesi.

Kebijakan dan regulasi yang dijadikan pedoman antara lain Undang-Undang Guru dan Dosen, aturan akreditasi, dan tata tertib internal PKBM. Terkait keadilan dan objektivitas, Kepala PKBM menunjukkan sikap yang adil kepada semua tutor, staf, dan warga belajar dengan cara menampung informasi, melakukan pendekatan, dan mengedepankan kepentingan lembaga. Penilaian terhadap warga belajar dilakukan secara objektif menggunakan Tes Kecakapan Akademik (TKA), serta menjaga kerahasiaan data agar tidak bocor. Keterbukaan dan transparansi dalam pengambilan keputusan dianggap sangat penting untuk menciptakan lingkungan sekolah yang sehat. Dalam hubungan dengan peserta didik, Kepala PKBM menekankan perlunya menghargai setiap warga belajar, menempatkan ego pribadi di sisi, serta bersikap profesional dalam memberikan bimbingan. Pendekatan dilakukan dengan cara mendengarkan keluhan, menengahi masalah secara bijaksana, dan menilai secara objektif meskipun ada kedekatan pribadi. Hubungan dengan sesama pengelola, tutor, dan staf dijaga melalui komunikasi yang baik, menghargai masukan, dan menyeimbangkan antara peran sebagai pemimpin dan teman. Perbedaan pendapat ditangani dengan musyawarah, menampung saran tanpa menyimpulkan secara sepihak, serta menekankan kepentingan lembaga di atas kepentingan pribadi.

Dalam hubungannya dengan masyarakat, Kepala PKBM menekankan pentingnya menjaga profesionalisme lembaga melalui kinerja guru yang baik, sikap jujur, dan hubungan harmonis dengan lingkungan sekitar. Kritik dan masukan dari masyarakat dijadikan evaluasi untuk perbaikan lembaga, serta pendidikan nonformal dipromosikan sebagai sarana menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Refleksi pribadi Ibu Upi menunjukkan bahwa nilai moral yang paling penting adalah kejujuran, karena perilaku pimpinan menjadi contoh bagi guru dan peserta didik. Tantangan terbesar dalam menjaga profesionalisme adalah tetap adil dan bijaksana, karena persepsi benar setiap orang bisa berbeda. Saran beliau bagi calon pengelola PKBM adalah menyiapkan mental yang kuat agar mampu menghadapi tantangan dan memimpin lembaga dengan baik. Dengan demikian, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa etika profesi bukan sekadar norma formal, tetapi integrasi antara moral, kompetensi profesional, dan kepedulian terhadap kesejahteraan peserta didik serta kelangsungan lembaga. Kepala PKBM sebagai pemimpin memiliki peran strategis dalam menegakkan etika profesi, membangun lingkungan kerja yang sehat, dan menjalin hubungan harmonis dengan masyarakat.

Pemahaman dan Internalisasi Etika Profesi Kepala PKBM Al Jauhar

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman etika profesi oleh Kepala PKBM Al Jauhar mencakup tanggung jawab moral, perilaku profesional, serta peran sebagai teladan bagi warga belajar dan pendidik. Hal ini sejalan dengan definisi etika profesi menurut Ngilim Purwanto (2002:45) yang menyatakan bahwa etika profesi adalah prinsip moral yang menjadi pedoman bagi seseorang dalam menjalankan pekerjaan profesional agar tidak menyimpang dari nilai kemanusiaan dan keadilan. Dalam praktik sehari-hari, Ibu Upi menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan sikap adil sebagai kompetensi utama pengelola PKBM, yang memperkuat landasan teori Keraf dalam Surajiyo (2022:784) mengenai prinsip etika profesi, seperti tanggung jawab, kejujuran, dan keadilan. Penekanan tersebut juga menggambarkan peran pengelola PKBM sebagai pemimpin yang bertanggung jawab mengatur program, mengelola tutor, dan menjaga mutu layanan.

Kepala PKBM juga menekankan keterkaitan antara etika, moral, dan hukum dalam menjalankan profesi. Etika dan moral mengendalikan sikap dan perilaku sehari-hari, sedangkan hukum menjadi batas formal yang mengatur konsekuensi profesional. Pandangan ini sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa penyelenggara pendidikan, termasuk pendidikan nonformal, harus menjalankan tugasnya secara profesional dan berlandaskan nilai moral serta etika.

Selain itu, refleksi pribadi Ibu Upi menekankan bahwa kejujuran menjadi nilai moral paling penting, karena perilaku pimpinan menjadi panutan bagi guru dan peserta didik. Tantangan terbesar adalah menjaga sikap adil dan bijaksana, mengingat persepsi “benar” dapat berbeda antar individu. Temuan ini menunjukkan bahwa etika profesi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan membutuhkan kesadaran moral dan kecerdasan emosional dalam setiap tindakan dan keputusan.

Implementasi Etika Profesi dalam Pengambilan Keputusan dan Hubungan Sosial

Dalam hal keadilan dan objektivitas, Ibu Upi mencontohkan praktik pengambilan keputusan dan penilaian warga belajar secara transparan dan adil, termasuk penggunaan Tes Kecakapan Akademik (TKA) untuk menilai kemampuan peserta didik secara objektif. Kepala PKBM menunjukkan sikap transparan dan objektif dalam menilai warga belajar dan mengelola program. Hal ini sejalan dengan pendapat Yusiaka (2016:49) yang menyatakan bahwa evaluasi program merupakan kegiatan sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data sebagai masukan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, keputusan yang diambil oleh pengelola PKBM harus didasarkan pada data yang objektif melalui proses evaluasi yang terstruktur.

Pendekatan ini mendukung prinsip Keraf terkait keadilan dan non-maleficence, karena semua pihak diperlakukan secara setara dan keputusan tidak merugikan individu manapun. Selain itu, penerapan keterbukaan dalam pengambilan keputusan sesuai dengan prinsip profesionalisme yang menekankan akuntabilitas terhadap lembaga dan masyarakat.

Hubungan dengan peserta didik, sesama pengelola, serta masyarakat juga menjadi bagian integral dari etika profesi. Hal ini sejalan dengan pendapat Safitri & Yusiaka (2020:208) yang menyatakan bahwa kompetensi sosial meliputi kemampuan bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan lembaga, berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, serta memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain. Kompetensi sosial ini menjadi aspek penting dalam mendukung keberhasilan pengelolaan PKBM. Hal tersebut terlihat dari upaya Kepala PKBM dalam menjaga komunikasi yang baik, menghargai masukan, membangun hubungan harmonis dengan masyarakat, serta menempatkan ego pribadi di sisi, yang merupakan praktik nyata dari prinsip tanggung jawab dan kebebasan profesional.

Pandangan ini diperkuat oleh Prahestiwi (2022) yang menyatakan bahwa efektivitas PKBM sangat dipengaruhi oleh kemampuan pengelola dalam membangun hubungan kerja yang harmonis dan membina warga belajar. Dengan demikian, etika profesi dan profesionalisme manajerial merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam konteks pengelolaan PKBM, karena keduanya saling menopang dalam membentuk kualitas kepemimpinan yang mampu menjaga kepercayaan masyarakat serta keberlanjutan lembaga pendidikan nonformal.

Pembahasan ini menegaskan bahwa penerapan etika profesi di PKBM Al Jauhar merupakan integrasi antara norma moral, kompetensi profesional, prinsip keadilan, dan tanggung jawab sosial. Komitmen tersebut hanya dapat terwujud apabila pengelola memiliki penghayatan etika profesi yang kuat sebagai landasan moral dalam setiap tindakannya. Kepala PKBM berperan strategis dalam memastikan lingkungan lembaga berjalan sehat, keputusan diambil secara objektif, serta hubungan dengan peserta didik dan masyarakat dijaga harmonis, sehingga lembaga dapat dipercaya dan diakui kualitasnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa etika profesi memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan lembaga pendidikan nonformal. Etika profesi menjadi pedoman moral dan perilaku profesional yang harus dijalankan oleh pengelola, guru, dan seluruh staf, sehingga keputusan yang diambil bersifat adil, objektif, dan transparan. Pengelola PKBM tidak hanya dituntut memiliki kompetensi teknis, tetapi juga harus menekankan nilai moral seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kepemimpinan yang bijaksana. Penerapan etika profesi terlihat dalam berbagai

aspek, mulai dari pengelolaan staf dan tutor, penilaian warga belajar, hingga hubungan dengan masyarakat dan lembaga lain. Dengan menerapkan prinsip etika profesi secara konsisten, PKBM dapat meningkatkan mutu layanan pendidikan, menjaga kepercayaan masyarakat, dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan nonformal.

Sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut, disarankan agar pengelola PKBM terus meningkatkan pemahaman dan penerapan etika profesi melalui pelatihan dan refleksi berkelanjutan, khususnya terkait kepemimpinan etis dan pengambilan keputusan profesional. Selain itu, instansi terkait diharapkan dapat memberikan pembinaan dan pendampingan secara berkala guna memperkuat tata kelola PKBM yang profesional, beretika, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

REFERENSI

- Amalia, N., & Rahmawati, D. (2021). Strategi peningkatan kompetensi kepala sekolah melalui pelatihan berkelanjutan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(1), 33–44. <https://doi.org/10.33751/jmp.v9i1.3210>
- Fitriani, D. (2020). Implementasi kebijakan pendidikan nasional di sekolah dasar. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 10(2), 201–214. <https://doi.org/10.21831/jkp.v10i2.31245>
- Hanafiah, U. (2019). Profesionalisme kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru. *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran*, 4(1), 66–78. <https://doi.org/10.17509/jpmanper.v4i1.14985>
- Hastuti, L. (2020). Tri pusat pendidikan (keluarga, sekolah, dan masyarakat) dalam membentuk akhlak melalui pembinaan agama. *Educreative: Jurnal Pendidikan Kreativitas Anak*, 5(1), 83–95. <https://doi.org/10.26858/educreative.v5i1.13521>
- Hidayat, R. (2017). Kepemimpinan pendidikan dan pengaruhnya terhadap mutu sekolah. *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 3(2), 89–101. <https://doi.org/10.21009/jip.032.05>
- Kurniawan, B. (2018). Pendidikan karakter melalui tri pusat pendidikan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 145–160. <https://doi.org/10.14421/jpi.2018.72.145-160>
- Lestari, F. (2019). Etika profesi guru dalam perspektif pendidikan karakter. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 9(1), 55–67. <https://doi.org/10.21831/jpk.v9i1.26745>
- Mulyasa, E. (2018). Manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah profesional. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 25(2), 123–135. <https://doi.org/10.17509/jap.v25i2.15678>
- Nugroho, T. (2022). Evaluasi program pendidikan nonformal menggunakan model CIPP. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 13(1), 77–90. <https://doi.org/10.21831/jep.v13i1.45678>
- Prahestiwi, E. R. (2022). Pengelolaan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM): Pendekatan manajemen bidang. *Communication & Education Journal*, 2(1), 45–56. <https://doi.org/10.32585/cej.v2i1.2190>
- Prasetyo, E. (2021). Etika profesi dalam perspektif pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 18(1), 88–102. <https://doi.org/10.14421/jpai.2021.181-06>
- Rahman, A. (2021). Tata kelola PKBM berbasis manajemen partisipatif. *Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia*, 12(1), 25–38. <https://doi.org/10.23887/japi.v12i1.34567>
- Safitri, A., & Yusiya, R. A. (2020). Pengelolaan diklat penguatan kepala sekolah untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah. *Jurnal Obor Penmas: Pendidikan Luar Sekolah*, 3(1), 203–210. <https://doi.org/10.32832/oborpenmas.v3i1.2987>
- Saputra, H., & Wulandari, S. (2023). Transformasi kepemimpinan pendidikan dalam meningkatkan mutu lembaga. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(1), 59–72. <https://doi.org/10.14421/jmpi.2023.81-05>

- Sari, M. P. (2020). Peran PKBM dalam pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 14(2), 102–115. <https://doi.org/10.32832/jpls.v14i2.3550>
- Surajiyo, S. (2022). Prinsip-prinsip etis profesi akuntan. *Prosiding Serina*, 2(1), 781–788. <https://doi.org/10.24912/serina.v2i1.18215>
- Suryana, Y. (2021). Implementasi etika profesi dalam dunia pendidikan. *Jurnal Etika dan Pendidikan*, 6(1), 15–27. <https://doi.org/10.21009/jep.061.02>
- Utami, R. (2022). Manajemen pendidikan nonformal di era digital. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 17(2), 134–147. <https://doi.org/10.17977/um041v17i2p134-147>
- Wahyudi, A., & Suryadi, D. (2019). Profesionalisme guru dalam meningkatkan mutu pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 4(2), 120–134. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v4i2.1234>
- Yusiyaka, R. A. (2016). Penilaian (evaluating) pada program pendidikan luar sekolah. *Educate: Jurnal Teknologi Pendidikan*, 1(1), 49–58. <https://doi.org/10.32832/educate.v1i1.467>